

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN III TAHUN 2023



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

Jalan Arif Rahman Hakim No. 1 Lumajang



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 Telp. (0334) 881485 Fax. (0334) 894126
Email : Inspektorat.Lumajangkab.go.id
LUMAJANG – 67313

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang pada Triwulan III Tahun 2023 dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan capaian program/ kegiatan tersebut, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023.

Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023, pada tahun 2023 pencapaian tujuan Inspektorat diukur dari 1 (satu) sasaran strategis “Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan meningkatnya efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan pemerintahan” dengan 1 (satu) indikator kinerja utama “Persentase Perangkat Daerah dengan indeks penerapan sistem pengendalian internal (SPI) minimal 3,5”.

Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Inspektorat Daerah sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya selaku penyelenggara pengawasan Internal dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lumajang dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja.

Lumajang, 13 Oktober 2023

INSPEKTUR DAERAH



Ir. MOHAMAD SUNARDI, MM

NIP. 19640701 199003 1 011



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
C. GAMBARAN UMUM.....	2
1. Perangkat daerah.....	2
2. Sumber Daya Aparatur.....	8
D. DASAR HUKUM.....	10
E. SISTEMATIKA.....	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH.....	28
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III.....	41
2. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	42
3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	45
4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	46
5. Permasalahan dan Inovasi Inpektorat Daerah Kabupaten Lumajang pada Triwulan III Tahun 2023.....	56
B. REALISASI ANGGARAN.....	57
BAB IV. PENUTUP.....	63
LAMPIRAN.....	65



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Triwulan III Tahun 2023	8
Tabel 2. Tujuan Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2023.....	17
Tabel 3. Realisasi Rencana Aksi Tahun 2023	18
Tabel 4. Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023.....	23
Tabel 5. Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023.....	25
Tabel 6. Program dan Indikator Kinerja Program (<i>out come</i>) Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023	27
Tabel 7. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Triwulan III Tahun 2023	31
Tabel 8. Capaian Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Triwulan III Tahun 2023	32
Tabel 9. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023	41
Tabel 10. Capaian Tindak Lanjut Terhadap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	44
Tabel 11. Alokasi Per Sasaran Inspektorat Daerah Triwulan III Tahun 2023	46
Tabel 12. Jenis dan Jumlah Obyek Pemeriksaan Inspektorat Daerah Triwulan III Tahun 2023	47
Tabel 13. Perbandingan Layanan ISC Tahun 2022 dan Triwulan III Tahun 2023	52
Tabel 14. Penanganan Kasus Triwulan III Tahun 2023 dan Periode Sebelumnya.....	53
Tabel 15. Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2023	57
Tabel 16. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Triwulan III Tahun 2023.....	61
Tabel 17. Hambatan/Tantangan dan Langkah Strategis Triwulan III Tahun 2023	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang	3
Gambar 2. Pohon Kinerja Inspektorat Daerah	5
Gambar 3. Alur Dokumen SAKIP Inspektorat Daerah	11
Gambar 4. Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Tahun 2023	17



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Perubahan Renstra Tahun 2018-2023	66
Lampiran 2. Matrik Rencana Kerja Tahun 2023	72



BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja bahwa Laporan Kinerja (LKj) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Oleh karena itu Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan dan Laporan Keuangan.

Selain memenuhi tuntutan akuntabilitas, hal terpenting dari latar belakang penyusunan laporan akuntabilitas ini adalah keinginan yang kuat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan terwujudnya tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan pengawasan internal pemerintahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem AKIP adalah bagian dari perwujudan implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Lumajang, termasuk didalamnya adalah penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Sistem pengendalian ini langkah manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Inspektorat Daerah telah dapat terpenuhi. Upaya penyelarasan antara program dan kegiatan diharapkan dapat memberikan dukungan secara memadai terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lumajang. Atas dasar



tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran dan program Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Triwulan adalah menilai capaian kinerja triwulan penyelenggaraan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.

Tujuan pelaporan kinerja Triwulan untuk memberikan informasi kinerja triwulan yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan kinerjanya.

C. GAMBARAN UMUM

1. Perangkat daerah

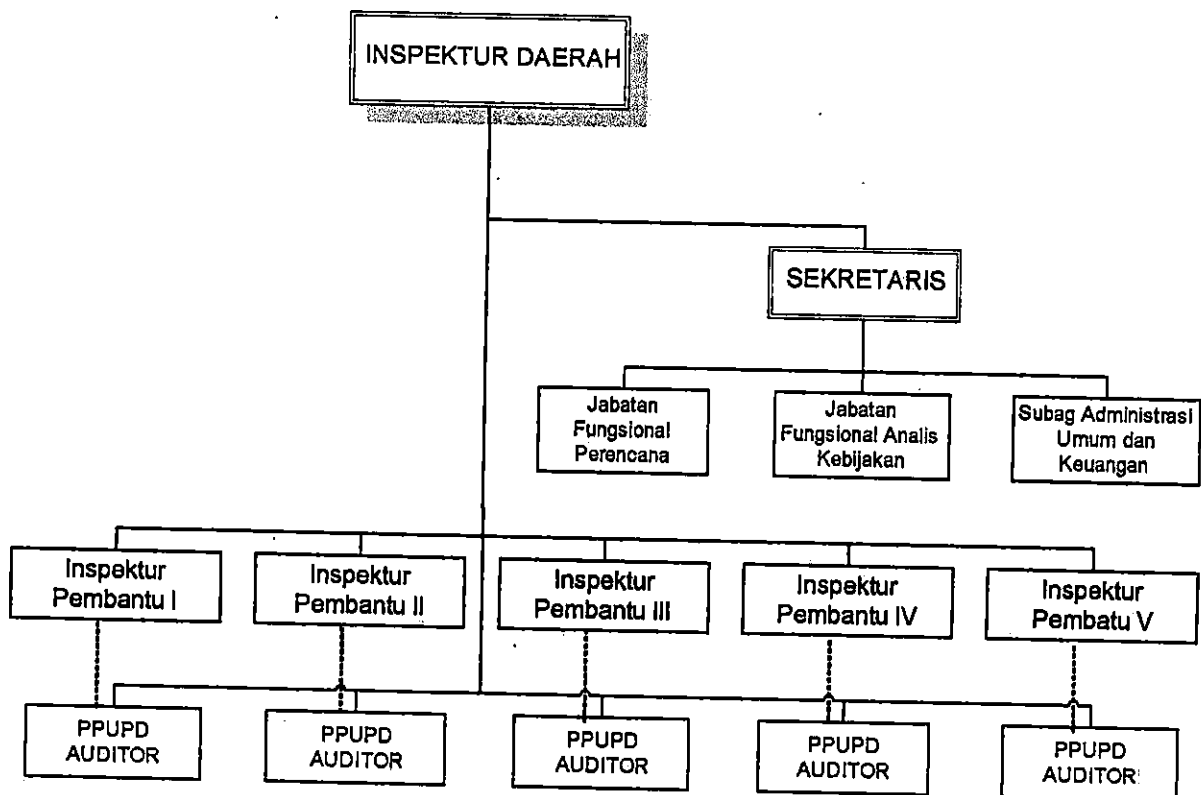
Pembentukan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah dan dijelaskan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Di samping itu, Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui pemeriksaan, reviu, Evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas Penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam semangat perbaikan layanan publik melalui penyederhanaan birokrasi serta penyetaraan jabatan, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang SOTK Inspektorat Daerah. Dalam peraturan tersebut telah disetarakan jabatan antara lain Kasubag Perencanaan menjadi fungsional perencana dan jabatan Kasubag Analis dan Evaluasi menjadi fungsional analis kebijakan. Adapun struktur organisasi Inspektorat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang SOTK Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

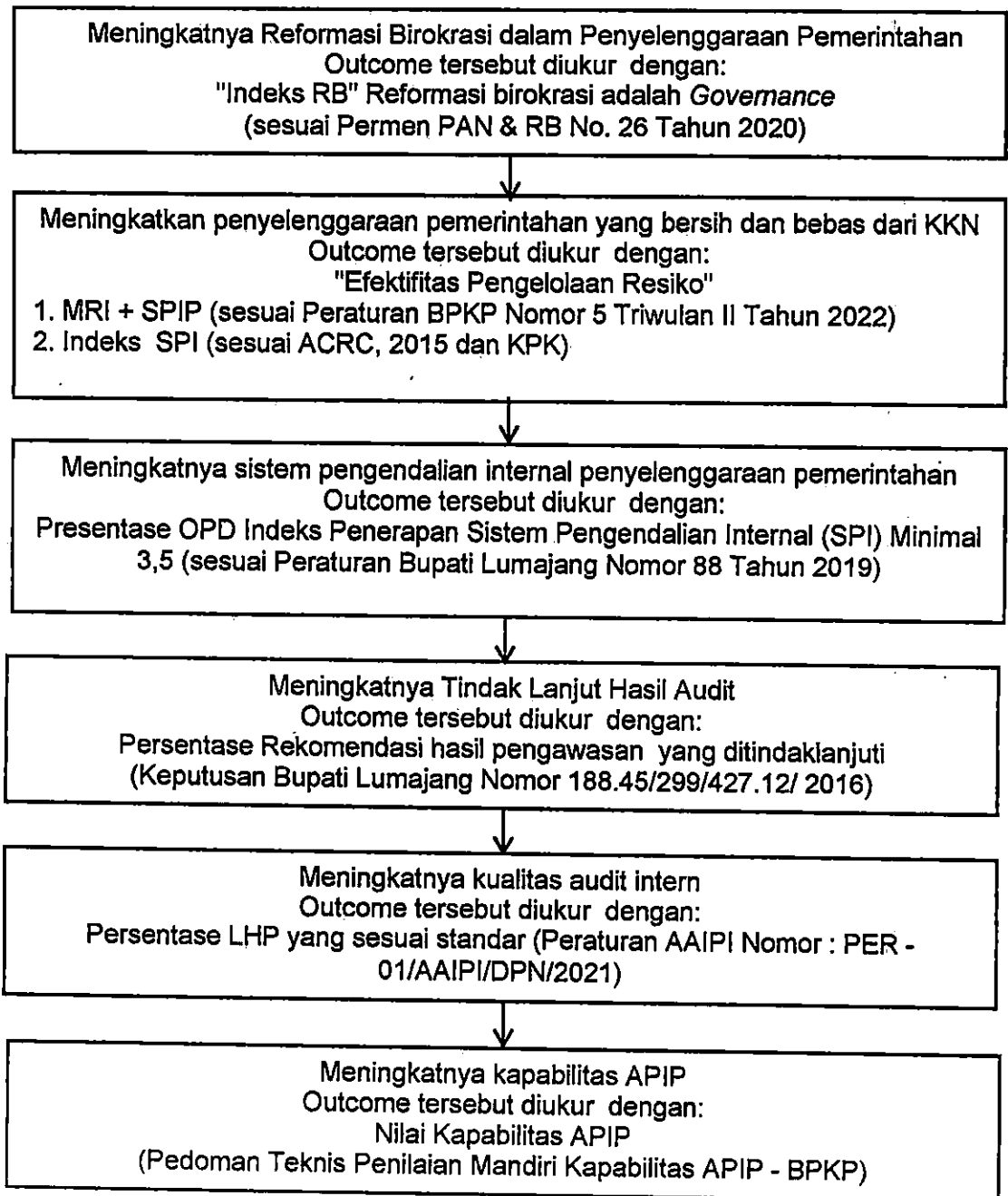


Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang



Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali alur logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi dalam mencapai kinerja.

Fungsi pohon kinerja adalah menemukan alternatif solusi atau pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh organisasi. Agar mendapatkan alternatif pemecahan masalah yang tepat tentu penyusunan pohon kinerja harus didasari pada kondisi faktual di lapangan dan berdasar pada *evidence* dan informasi yang andal. Pohon kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pohon Kinerja Inspektorat Daerah



Inspektorat Daerah telah menyusun pohon kinerja yang sesuai dengan *outcome* pemerintah Kabupaten Lumajang dan diturunkan hingga *level* operasional dengan prinsip logis, empiris dan holistik. Pohon kinerja Inspektorat Daerah didasarkan pada teori GRC (*governance risk management and Control*) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta permasalahan-permasalahan aktual yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Inspektorat Daerah pada khususnya.

Konsep pohon kinerja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

a. *Governance* (Tata Kelola)

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Pemerintah menerapkan reformasi birokrasi sebagai upaya/langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga lebih adaptif dan bebas korupsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Outcome tersebut diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 26 tahun 2020.

b. *Risk Management* (Manajemen Resiko)

BPKP telah mengeluarkan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dimana dalam penilaian tersebut telah dilakukan integrasi



penilaian antara SPIP, MRI (Manajemen Resiko Indeks), IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) dan Kapabilitas APIP. Outcome tersebut diukur dengan Efektifitas Pengendalian Resiko dengan indikator nilai SPIP dan MRI tingkat kabupaten.

KPK telah melaksanakan Survei Penilaian Integritas sebagai salah satu perangkat diagnostik yang dapat membantu memetakan capaian upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya pemerintah daerah diminta untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan integritas. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas pemerintah kabupaten semakin baik. Outcome tersebut diukur dengan Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas).

c. *Control/Compliance* (pengendalian/kepatuhan)

Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menerbitkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Perubahan dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan khususnya terkait penyelenggaraan manajemen resiko dan penilaian maturitas sistem pengendalian pemerintah. Outcome tersebut diukur dengan Presentase OPD Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Minimal 3,5.

d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Outcome dari pelaksanaan pemeriksaan atau pengawasan adalah laporan hasil pengawasan/pemeriksaan. Perangkat daerah wajib melakukan tindak lanjut atas temuan sebagai perbaikan internal yang selaras dengan *risk register* yang telah disusun dalam upaya penerapan sistem pengendalian internal di perangkat daerah tersebut. Outcome tersebut diukur dengan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dengan berpedoman pada Keputusan Bupati Lumajang Nomor :188.45/299/427.12 /2016.



e. Kualitas Audit Intern

Kualitas profesi audit internal dituntut bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam mengembang tugas sebagai pemberi jasa *assurance* dan jasa *consulting*. Pemenuhan kualitas dicapai ketika APIP memenuhi secara penuh standar audit yang telah ditetapkan. Program jaminan kualitas dan peningkatan merupakan salah satu faktor penting dalam pemenuhan standar audit. Output dari pemeriksaan/pengawasan adalah laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yaitu dokumen yang memuat informasi tentang temuan dan rekomendasi menurut kriteria/standar tertentu. Outcome tersebut diukur dengan Persentase LHP yang memenuhi standar.

f. Kapabilitas APIP

Upaya reformasi birokrasi dalam bidang pengawasan untuk mewujudkan peran APIP yang efektif termaktub dalam dalam pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008. Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Efektifitas peran APIP tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai. Outcome tersebut diukur dengan Nilai Kapabilitas APIP atas *assessment* dari BPKP.

2. Sumber Daya Aparatur

Perkembangan Jumlah dan komposisi Pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang pada Triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Triwulan III Tahun 2023

Klasifikasi		Jumlah Total	Laki-Laki	Perempuan
A	Status Kepegawaian			
	- ASN	: 35	18	17
	- Tenaga kontrak	: 8	7	1
	Jumlah Pegawai	: 43	25	18



Klasifikasi		Jumlah Total	Laki-Laki	Perempuan
B	Pendidikan ASN			
	- Magister (S2)	: 6	4	2
	- Sarjana (S1)	: 20	10	10
	- Sarjana Muda/Diploma III (D3)	: 4	2	2
	- Sarjana Muda/Diploma II (D2)	: -	-	-
	- Sarjana Muda/Diploma I (D1)	: -	-	-
	- SLTA	: 5	2	3
	- SLTP	: -	-	-
	- SD	: -	-	-
	Jumlah	: 35	18	17
C	Pendidikan tenaga kontrak			
	- Sarjana (S1)	: 4	3	1
	- SLTA	: 4	4	-
	Jumlah	: 8	7	1
D	Pangkat dan Golongan			
	- Pembina Utama Madya (IV/d)	: -	-	-
	- Pembina Utama Muda (IV/c)	: 2	1	1
	- Pembina Tingkat I (IV/b)	: 6	3	3
	- Pembina (IV/a)	: 2	2	-
	- Penata Tingkat I (III/d)	: 9	4	5
	- Penata (III/c)	: 3	2	1
	- Penata Muda Tingkat I (III/b)	: 4	1	3
	- Penata Muda (III/a)	: 2	1	1
	- Pengatur Tingkat I (II/d)	: 3	1	2
	- Pengatur (II/c)	: 3	2	1
	- Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	: 1	1	-
	- Pengatur Muda (II/a)	: -	-	-
	- Juru Tingkat I (I/d)	: -	-	-
	- Juru (I/c)	: -	-	-
	- Juru Muda Tingkat I (I/b)	: -	-	-
	- Juru Muda (I/a)	: -	-	-
	Jumlah	: 35	18	17
E	Pejabat Struktural			
	- Eselon II	: 1	1	-
	- Eselon III	: 6	2	4
	- Eselon IV	: 1	-	1
	Jumlah	: 8	3	5
F	Pejabat Fungsional			
	- Fungsional Auditor	: 10	3	7
	- Fungsional P2UPD	: 5	4	1
	- Fungsional Perencana	: 1	1	-
	- Fungsional Analisis Kebijakan	: 1	1	-
	Jumlah	: 17	9	8
G	Pelaksana	: 10	6	4
	Jumlah	10	6	4

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023 (Data diolah)



D. DASAR HUKUM

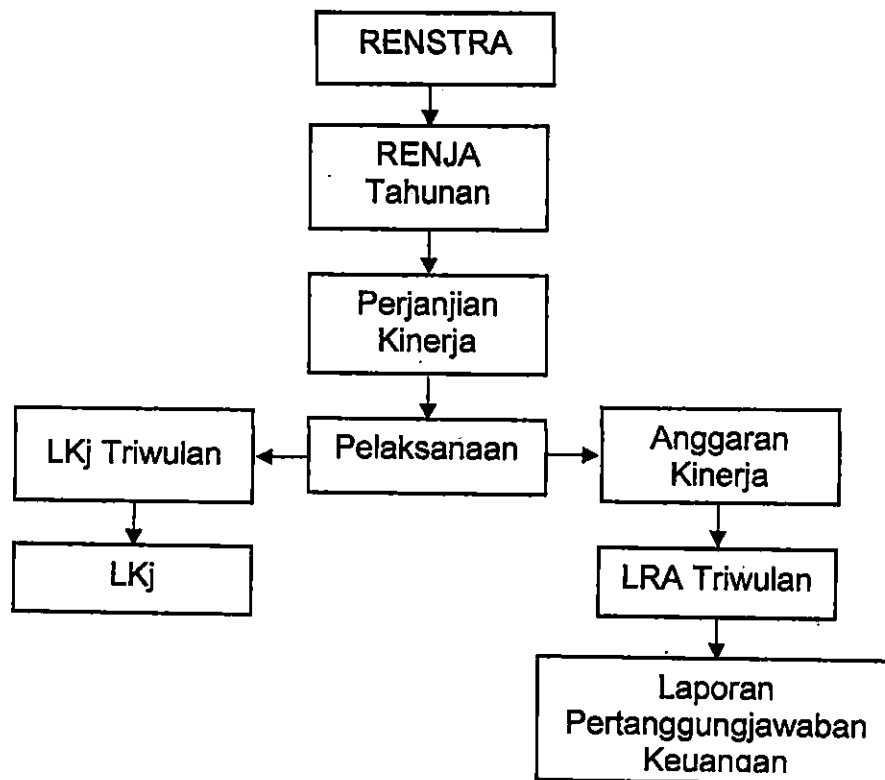
Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya akuntabilitas dalam perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam tahap pertanggungjawaban anggaran sangat jelas bahwa Kepala Daerah wajib bertanggung jawab terhadap outcome dan disampaikan sebagai penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran (NPA);
2. Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja, dimana laporan kinerja dibuat berdasarkan sistem AKIP
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
6. Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati

Lumajang nomor 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Alur dokumen SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dimulai dari perencanaan sampai dengan dengan pelaporan yang dapat disajikan dalam bentuk alur sebagai berikut:



Gambar 3. Alur Dokumen SAKIP Inspektorat Daerah

Adapun Laporan Kinerja Triwulan III Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yaitu dengan menekankan pada aspek strategis organisasi serta strategi isu yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, mengurai mengenai Renstra 2018-2023, Pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program, IKU, Program Kegiatan serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023.



BAB III :AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan:

A. Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
4. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
5. Permasalahan dan Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2023.

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV :PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. MATRIKS RENSTRA 2018-2023
2. RENJA TAHUN 2023

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Visi Kabupaten Lumajang adalah “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”. Untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan Misi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
3. Reformasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governace*) yang berbasis teknologi Informasi.

Berkaitan dengan misi yang ketiga, peran Inspektorat Daerah selaku perangkat daerah yang melakukan pengawasan akan menindaklanjuti dan mengimplemtasikan visi dan misi tersebut. Tujuan Pemerintah Kabupaten Lumajang merujuk pada RPJMD adalah “Meningkatkan Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi”.

Tujuan yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selaras dengan sasaran RPJMD yaitu “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN” dengan indikator tujuan adalah Jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan *Self Assessment* WBK. Sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang adalah meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan meningkatnya efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 maka Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dengan indikator sasaran dan terget sesuai dengan yang telah tertuang dalam matriks Renstra dan Renja. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Target pencapaian tahunan



merupakan bagian integral dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian target jangka menengah 5 tahunan.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Mohamad Sunardi, M.M

Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Thoriqul Haq, M.ML

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.


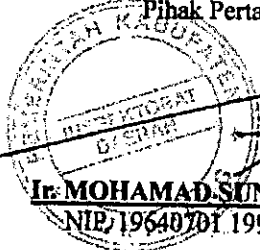
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,


H. THORIQUL HAQ, M.ML

Pihak Pertama,


Ir. MOHAMAD SUNARDI, M.M
NIE/196407011990031011



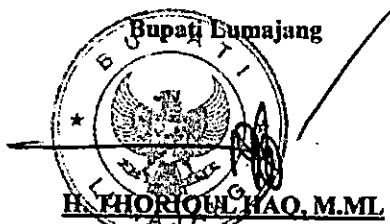
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

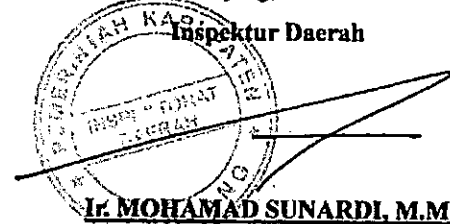
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>good governance</i> dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Minimal 3,5	75%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	75%
2	Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pengawasan lainnya (pembinaan)	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti	75%
	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase LHP yang sesuai standar	90%
	Meningkatnya kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	3,5
3	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	95%



No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 331.770.000	DAU
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 287.301.000	DAU
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.416.402.705	DAU
	Total	Rp. 6.035.473.705	

Lumajang, 10 Januari 2023

 **Bupati Lumajang**
H. THORIQUL HAQ, M.M.L.

 **Inspektur Daerah**
I. MOHAMAD SUNARDI, M.M.
NIP.19640701 199003 1 011

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Tahun 2023

Tabel 2. Tujuan Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
Meningkatkan Penyeleggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN		Efektivitas pengelolaan resiko tingkat kabupaten	OPD	0	0	0	3
		Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas)	angka	0	0	0	82,5
	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan meningkatnya efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah dengan penerapan sistem pengendalian internal minimal 3,5	Daerah indeks sistem pengendalian internal (SPI)	%	0	75	0

Sumber: Inspektorat Daerah Tahun 2023



Rencana aksi disusun untuk menjabarkan kinerja tahunan menjadi triwulan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Realisasi Rencana Aksi Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				REALISASI			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
A. Program/Kegiatan Teknis										
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	-	60%	-	75%	-	42,1	0	-
1.a	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan umum (general) yang diterbitkan	16	41	78	12	11	9	92	-
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah.	2	11	50	1	1	8	58	-
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	3	6	5	4	1	0	25	-
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	2	0	0	0	2	0	0	-
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	1	0	0	0	1	0	0	-
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan desa	0	15	15	0	0	0	9	-
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	8	8	8	6	6	0	0	-
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	0	1	0	0	0	1	0	-
1.b	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (specific) yang diterbitkan	11	10	12	13	17	4	11	-
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian negara	1	0	2	2	1	0	2	-
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil PDTT	10	10	10	10	17	4	9	-



PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				REALISASI			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
A. Program/Kegiatan Teknis										
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti	0%	60%	0%	75%	0%	60	60	-
		Persentase LHP yang sesuai standar	90%	90%	90%	90%	100%	90	90	-
		Nilai Kapabilitas APIP	-	-	-	3	-	0	-	-
2.a	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan	2	2	2	4	2	4	9	-
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	2	2	1	10	2	4	9	-
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	0	0	0	15	0	0	-	-
2.b	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang diterbitkan	7	8	11	8	2	12	11	-
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	72	72	72	72	60	60	72	-
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	52	52	52	52	43	12	11	-
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2	2	2	4	2	2	2	-
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	56	56	56	56	0	13	2	-



PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				REALISASI				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
<i>B. Program/Kegiatan Pendukung</i>											
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	30	53	71	100	31	46	62	-	
3.a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	32	53	74	100	32	47	68	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1	1	0	1	1	0	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	0	1	1	1	0	1	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	2	1	1	1	2	1	1	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2	2	2	2	2	2	2	-	
3.b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25	50	73	100	25	51	74	-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34	34	34	34	34	35	35	-	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	3	3	3	3	3	3	3	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	0	0	0	1	0	0	-	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	2	1	1	1	4	5	4	-	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi	0	0	0	1	0	0	0	-	



PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				REALISASI			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
3.c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	0	0	100%	0	0	55	0	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	0	0	28	0	0	0	0	-
3.d	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	32	55	77	100	32	55	77	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	1	0	0	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	2	0	0	0	2	0	0	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	0	0	0	1	0	0	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10	10	10	10	10	10	10	-
3.e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	0%	66%	0	100%	0%	67	0	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin yang terfasilitasi	0	2	0	1	0	2	0	-



PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				REALISASI			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
3.f	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	25%	50%	75%	100%	25%	50	75	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	3	3	3	3	1	3	3	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3	3	3	3	3	3	3	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3	3	3	3	6	3	3	-
3.g.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	100%	100%	100%	100%	49	73	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	27	27	27	27	27	27	27	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9	9	9	9	9	9	9	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	0	1	0	0	0	0	0	-



Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu sumberdaya berupa anggaran sebagai modal untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Berikut adalah *nomenklatur* program dan pagu anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja antara Inspektur Daerah dengan Bupati Lumajang

Tabel 4. Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)
A. Program/Kegiatan Teknis		
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	331.770.000
1.a	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	229.101.000
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	70.791.000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	59.841.000
	Reviu Laporan Kinerja	14.994.000
	Reviu Laporan Keuangan	24.969.000
	Pengawasan Desa	19.500.000
	Kerjasama Pengawasan Internal	25.047.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	13.987.000
1.b	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	102.669.000
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12.690.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	89.979.000
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	287.301.000
2.a	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	59.272.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	41.304.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	17.968.000
2.b	Pendampingan dan Asistensi	228.029.000
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	5.860.000
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31.839.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	170.396.000
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	19.934.000



PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
<i>B. Program/Kegiatan Pendukung</i>		
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.416.402.705
3.a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.958.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.999.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.999.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.980.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.980.000
3.b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.261.452.470
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.212.594.470
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.260.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.866.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	2.866.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.866.000
3.c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	225.990.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	225.990.000
3.d	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.951.037
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.985.676
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.010.019
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.980.342
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.975.000
3.e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.032.263
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.032.263
3.f	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.004.330
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.232.330
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.872.000
3.g	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.014.605
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.360.605



	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46,660,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.994.000
JUMLAH		6.035.473.705

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023 (Data diolah)

Dalam upaya mencapai target sasaran (hasil) maka perlu adanya program dan kegiatan yang lebih bersifat operasional dan teknis. Berikut adalah Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2023.

Tabel 5. Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Keuangan 5. Pengawasan Desa 6. Kerjasama Pengawasan Internal 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
		2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara 2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
		2. Pendampingan dan Asistensi	1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
3	Program Penunjang Urusan	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	<ol style="list-style-type: none">2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN3. KOordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD4. Koordinasi san Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	<ol style="list-style-type: none">3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	<ol style="list-style-type: none">4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	<ol style="list-style-type: none">5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	<ol style="list-style-type: none">6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	<ol style="list-style-type: none">7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023 (Data diolah)



Selanjutnya untuk program dan indikator (*out come*) Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Program dan Indikator Kinerja Program (*out come*) Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja Program (<i>out come</i>)
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindaklanjuti2. Persentase LHP yang sesuai standar3. Nilai Kapabilitas APIP
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023 (Data diolah)

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang didasarkan pada: 1) rangkaian sistem perencanaan (*Planning*) yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Rencana Kerja) dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang; 2) Fungsi *organizing* seluruh sumber daya dalam koridor prosedur yang telah ditetapkan yang kemudian menjadi dasar melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi pengawasan dan pembinaan sebagai fungsi *actuating* dari perencanaan yang sudah dibuat; 3) Di akhir kegiatan terdapat fungsi *evaluating*, dimana semua pelaksanaan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggungjawaban penggunaan seluruh sumber daya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan harus diukur sesuai kriteria dan indikatornya. Hal ini dimaksudkan agar arah kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sudah berkesesuaian dengan tujuan-tujuan yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja Inspektorat baik triwulan maupun tahunan. Langkah Pembandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :



- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

85 ke atas	:	Sangat Baik
$70 \leq x < 85$:	Baik
$55 \leq x < 70$:	Cukup Baik
$x < 55$:	Kurang Baik

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2018-2023. Pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2023 sudah mengacu dan sesuai dengan rencana kerja perubahan Tahun 2023.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor



yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan Triwulan III Tahun 2023. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2023 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran.

Tujuan Capaian indikator dan target Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2023 disajikan pada Tabel 6. Sedangkan Capaian Program/kegiatan berdasarkan target dan realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Triwulan III Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pembilang	Penyebut	Target Triwulan III 2023	Realisasi Triwulan III 2023	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>good governance</i> dan meningkatnya efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Minimal 3,5.	39	49	-	73,47	98	Sangat Baik

Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Pada Triwulan III diukur dari Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang dengan Bupati Lumajang dengan Indikator Kinerja yang berbunyi "Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Minimal 3,5." Indikator Kinerja ini lebih menggambarkan sebuah potret penerapan Sistem Pengendalian Intern yang capaiannya bersifat fluktuatif. Merunut pada dokumen *Action Plan* Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023, Pada Triwulan III Target kinerja tidak ditetapkan, karena pengukuran terhadap indikator kinerja dilakukan setiap akhir semester, atau pada akhir periode triwulan genap. Namun demikian, untuk mengukur dan memantau kinerja inpektorat pada triwulan III, dilakukan perbandingan dengan target capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 75%, maka capaian kinerjanya mencapai 98%. Capaian ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.



Tabel 8. Capaian Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Triwulan III Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan III Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023	
					K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>good governance</i> dan meningkatnya efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan pemerintahan		Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Minimal 3,5.	%	75	1,384,992,509.00	73,47	1,351,922,332
1		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	0%	92,864,950	0	155,770,500
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan umum (general) yang diterbitkan	laporan	78	69,302,700	92	110,796,500



No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan III Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023	
					K	Rp	K	Rp
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	laporan	50	32,493,000	58	48,301,000.00
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	laporan	5	36,809,700	25	38,008,000.00
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	laporan	0	-	0	0.00
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	laporan	0	-	0	0.00
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Laporan	15	-	9	19,500,000.00
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepak atan	8	-	7	4,987,500.00
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dok	0	-	0	0.00



No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan III Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023	
					K	Rp	K	Rp
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (specific) yang diterbitkan	Lap	12	23,562,250	11	44,974,000.00
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian negara	Lap	2	-	2	480,000.00
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Lap	10	23,562,250	9	44,494,000.00
2.		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti	%	0	95,761,500	60	81,208,000.00
			Persentase LHP yang sesuai standar	%	90		90	
			Nilai Kapabilitas APIP	-	-		-	
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan	Lap	2	4,630,000	9	3,710,000.00



No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan III Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023	
					K	Rp	K	Rp
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah laporan hasil Quality assurance yang terfasilitasi	Lap	2	4,630,000	9	3,710,000.00
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	Rek	0	0	-	0
		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang diterbitkan	Lap	11	91,131,500	11	77,498,000.00
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	OPD	72	1,465,000	72	2,922,000.00
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Lap	52	8,518,500	11	10,638,000.00
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Keg	2	80,698,000	2	55,167,000.00
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	OPD	56	450,000	2	8,771,000.00



No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan III Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023	
					K	Rp	K	Rp
3.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	71	1,196,366,059	62	1.114.943.832
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	74	-	68	0
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	0	-	-	0
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD	dok	1	-	1	0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan caoaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	Lap	1	-	1	0
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	2	-	2	0



No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan III Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023	
					K	Rp	K	Rp
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	73	1,012,342,504	74	938.066.117
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org	34	1,002,277,504	35	928.001.117
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dok	3	10,065,000	3	10,065,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Lap	0	-	0	0
		Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Lap	4	-	4	0
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi anggaran	Dok	0	-	0	0



No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan III Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023	
					K	Rp	K	Rp
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	%	100	-	0	0
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	Org	28	-	0	0
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	%	77	55,586,250	77	50,846,790
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	pkt	0	-	0	0
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	pkt	0	-	0	0
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	pkt	0	-	0	0
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	10	55,586,250	10	50.846.790



No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan III Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023	
					K	Rp	K	Rp
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	%	0	-	0	0
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin yang terfasilitasi	brg	0	-	0	0
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	%	75	82,779,000	75	77,346,804
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	Lap	3	-	3	27,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	3	39,561,000	3	34,163,997
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	3	43,218,000	3	43,155,807



No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan III Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023	
					K	Rp	K	Rp
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	%	100	45,658,305	73	48,684,121
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kend	27	32,745,805	27	35,939,121
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pelt	9	12,912,500	9	12,745,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Gdg	0	-	0	0

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023 (Data diolah)



1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III

Perbandingan antara target dengan Capaian kinerja Inspektorat Daerah Triwulan III Tahun 2023 disajikan dalam tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target Triwulan III Th. 2023	Realisasi Triwulan III Th. 2023	Capaian (%)
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>good governance</i> dan meningkatnya efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Minimal 3,5.	75%	73,47%	98

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023 (Data diolah)

Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Pada Triwulan III diukur dari Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang dengan Bupati Lumajang dengan Indikator Kinerja yang berbunyi "Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Minimal 3,5." Indikator Kinerja ini lebih menggambarkan sebuah potret penerapan Sistem Pengendalian Intern yang capaiannya bersifat fluktuatif. Merunut pada dokumen *Action Plan* Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023, Pada Triwulan III Target kinerja tidak ditetapkan, karena pengukuran terhadap indikator kinerja dilakukan setiap akhir semester, atau pada akhir periode triwulan genap. Namun demikian, untuk mengukur dan memantau kinerja inpektorat pada triwulan III, dilakukan perbandingan dengan target capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 75%, maka capaian kinerjanya mencapai 98%. Capaian ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Sasaran strategis Inspektorat daerah yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Inspektur Daerah dan Bupati Lumajang adalah Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan meningkatnya efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dimana Keberhasilan pencapaiannya diukur dari indikator Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Minimal 3,5.

Berdasarkan capaian yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun analisis keberhasilan atau kegagalan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Nilai Pemenuhan Reformasi Birokrasi Unit

Dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Pemerintah secara berkelanjutan terus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah (pemerintah daerah), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian Reformasi Birokrasi secara mandiri (*self-assessment*). Dalam rangka mempermudah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi PMPRB maka penilaian tersebut dilakukan secara *online* dan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dimaksud.

Dalam pelaksanaannya, Nilai PMPRB Pusat dan Unit telah terintegrasi, dimana Inspektorat Daerah selaku Tim Penilai Intern sudah membangun sistem pengawasan online www.simaud.inspektorat.lumajangkab.go.id yang dapat diakses untuk pemenuhan penilaian oleh seluruh perangkat daerah/unit di Kabupaten Lumajang. Namun demikian, dengan adanya wacana penerapan Reformasi Birokrasi Tematik pada tahun 2023 oleh kementerian PAN/RB. Dimana fokus Reformasi Birokrasi bukan lagi

hanya terkait pemenuhan data, tetapi lebih kepada penyelesaian permasalahan di sekelilingnya, yang meliputi tema Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Layanan Pemerintah, serta Mendukung Program Presiden.

2) Nilai Pemenuhan Tindak Lanjut

Pada Triwulan III Tahun 2023 pemenuhan tindak lanjut masih didasarkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun 2022, Persentase tindak lanjut entitas Pemerintah Kabupaten Lumajang telah tercapai 93,04% dari rekomendasi LHP BPK mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2022. Pada laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut terdapat 479 temuan pemeriksaan dengan 992 rekomendasi dan telah diselesaikan sebanyak 923 rekomendasi. Rekomendasi temuan berdasarkan nilai keuangan sejumlah Rp. 21.872.391.877,79 dan telah terselesaikan sebesar Rp. 17.885.061.089,19. Sehingga masih tersisa sebesar Rp3.987.330.788, dengan rincian belum sesuai rekomendasi BPK sebesar Rp. 2.393.621.401,12 dan belum ditindaklanjuti sebesar Rp. 1.593.709.387,48. Dengan demikian persentase penyelesaian tindak lanjut temuan keuangan BPK meningkat dari 80,94% pada Triwulan I menjadi 81,77 % pada Triwulan III.

Berdasarkan laporan hasil perbandingan pemantauan penyelesaian tindak lanjut semester I tahun 2022 dengan laporan hasil pemantauan penyelesaian tindak lanjut semester II tahun 2022, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan status penyelesaian tindak lanjut sebanyak 19 rekomendasi. Nilai penyelesaian kerugian daerah berhasil berhasil ditingkatkan menjadi Rp. 17.885.061.089,19. Dari total Rp. 21.872.391.877,79 yang harus diselesaikan, atau meningkat sebesar 8,9 % (Rp.1.471.098.367,41) bila dibandingkan dengan triwulan I.

Namun demikian, bilamana dibandingkan dengan laporan hasil pemantauan penyelesaian tindak lanjut Pemeriksaan BPK semester I tahun 2022, yang dijadikan sebagai dasar penyusunan LKJ Triwulan I dan II, dapat diketahui bahwa berdasarkan pemantauan TLRHP semester II Tahun 2022 terdapat penambahan

LHP PDDT belanja daerah sector jasa konstruksi Tahun Anggaran 2022, sehingga terdapat penambahan temuan pemeriksaan sebanyak 3 dengan 6 rekomendasi serta penambahan nilai kerugian sebesar Rp. 1.806.381.479,30 dan belum terselesaikan sebesar Rp. Rp. 1.593.709.387,48

Selain upaya penyelesaian hasil temuan BPK, Inspektorat daerah juga melakukan upaya-upaya penyelesain tindak lanjut terhadap pemeriksaan mandiri yang dilakukan terhadap perangkat daerah dan perangkat desa. Perhitungan capaian tindak lanjut dihitung berdasarkan data tahun 2010 sampai dengan Bulan Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian Tindak Lanjut Terhadap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa

Capaian Tindak Lanjut	Perangkat Daerah	Pemerintah Desa
Temuan Pemeriksaan	584	909
Rekomendasi	15.155	25.481
Rekomendasi Selesai	11.537	20.851
Capaian TL	76,13 %	81,83 %

Sumber: Diolah Dari Data Inspektorat Daerah Tahun 2023

3) Nilai Pemenuhan TGR

Pada triwulan III Tahun 2023, tercatat dua nilai pemenuhan TGR yang harus diselesaikan, namun hingga saat ini masih dalam tahap proses penyelesaian. Hambatan dalam pemenuhan TGR sebagian besar karena adanya keterlambatan pelunasan pada beberapa pihak yang dikenai TGR dengan berbagai alasan. Sehingga terdapat beberapa capaian pemenuhan TGR yang belum optimal. Namun demikian Inspektorat Daerah telah melakukan inovasi dengan telah adanya ruang sidang terintegrasi guna percepatan pemenuhan penyelesaian TGR.

4) Nilai pencapaian LHKS

Berdasarkan data rekap per Juli 2023, tercatat 3.640 orang ASN, atau 66,88% dari total ASN 5.442 orang telah melaporkan kekayaan pada sistem SIHARKA. Hambatan yang muncul pada sistem pelaporan ini adalah banyak pelapor yang lupa/tidak menyimpan akses (*username* dan *password*) secara tertib dan mengakibatkan pelaporan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

5) Nilai Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi

Hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan nilai kepatuhan pelaporan gratifikasi adalah belum seluruh pihak memahami atas ketentuan dan kewajiban pelaporan gratifikasi jika menerima/mendapatkan kondisi yang termasuk dalam gratifikasi.

6) Nilai Pemenuhan *Fraud Risk Control*

FRC (*Fraud Risk Control*) merupakan sistem yang dibangun dengan referensi dari *Monitoring Control Prevention* KPK. Jenis-jenis FRC sendiri terdiri atas:

- a) FRC FRC Perangkat Daerah
- b) FRC Desa
- c) FRC Sekolah,
- d) FRC Unit (Pasar, Puskesmas)
- e) FRC Tematik (Peningkatan investasi, FRC peningkatan IPM, FRC penanggulangan kemiskinan dan digitalisasi administrasi).

Evaluasi FRC dilaksanakan secara berjenjang, dimana pertama dilaksanakan oleh Lini I, Lini II dan Inspektorat Daerah sebagai Lini III. Indikator FRC di tahun 2023 dijadikan sebagai salah satu indikator dalam indeks TPP.

Hambatan dalam pelaksanaan FRC secara umum adalah pemahaman OPD dan Pemerintah Desa yang belum optimal terhadap prosedur pemenuhan FRC. Berbagai upaya optimalisasi pemenuhan FRC telah dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan asistensi oleh Inspektorat Daerah.

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Inspektorat Daerah didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam DAU sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:



Tabel 11. Alokasi Per Sasaran Inspektorat Daerah Triwulan III Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan Meningkatnya efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Minimal 3,5.	1.384.992.509	1.351.922.332	98

Sumber : Inspektorat Daerah (Data diolah tahun 2023)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran Inspektorat Daerah pada Triwulan III mencapai Rp. 1.351.922.332 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1.384.992.509, atau mencapai 98 % dari target yang telah ditetapkan. Bila mengacu pada standar capaian anggaran, maka capaian ini tergolong sangat baik. Namun, untuk menilai efisiensi penggunaan anggaran tidak dapat dilakukan pada Triwulan III, karena sasaran yang ditetapkan oleh Inspektorat daerah adalah hasil akumulasi kinerja selama 1 (satu) tahun. Sehingga target kinerja yang ditetapkan adalah target kinerja 1 (satu) tahun dan bukan target kinerja triwulan.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan menggunakan analisis input, proses dan output. Adapun dua program utama dan satu program penunjang telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel serta berorientasi hasil. Hal ini berdampak pada pencapaian kinerja dengan kategori sangat baik dimana semua program dan kegiatan telah mendukung pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah. Berikut adalah kegiatan / aktivitas yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Inspektorat Daerah :



a. Pengawasan.

Inspektorat Daerah sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan wajib melaksanakan pemeriksaan terhadap perangkat daerah dan seluruh elemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Berikut adalah kinerja Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pemeriksaan.

Tabel 12. Jenis dan Jumlah Obyek Pemeriksaan Inspektorat Daerah Triwulan III Tahun 2023

No	Jenis Pengawasan	Obyek Pemeriksaan
1	Pemeriksaan Reguler	-
2	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	LH PDTT / Investigasi atas indikasi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang TA. 2019
		LH PDTT AMJ Desa Tukum Kecamatan Tekung TA. 2023
		LH PDTT AMJ Desa Tempurejo Kecamatan Tempursari TA. 2023
		LH PDTT AMJ Kepala Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2023 An, RUDY PRASETYO
		LH PDTT AMJ Kepala Desa Umbul Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Tahun 2023
		LH PDTT AMJ Kepala Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2023
		LH PDTT AMJ Kepala Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2023
		LH PDTT AMJ Kepala Desa Candipuro Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Tahun 2023
		LH PDTT AMJ Kepala Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Tahun 2023
		3
P2HP LHM atas Penanganan Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2023 di Wilayah Kabupaten Lumajang		
LHR KUA PPAS Tahun 2024		
LHR atas Pengusulan Penghapusan Piutang Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang		
LHR Perubahan KUA PPAS RKA SKPD dan RKA SKPKD Tahun Anggaran 2023		
LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahap I syarat salur Tahap II TA. 2023		
LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Bidang Pendidikan TA. 2023 pada Dinas Perikanan Tahap I		



No	Jenis Pengawasan	Obyek Pemeriksaan
		syarat salur Tahap II
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Bidang Pendidikan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan TA. 2023 Tahap I syarat salur Tahap II
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Bidang Pendidikan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahap I syarat salur Tahap II TA. 2023
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan Pendidikan TA. 2023 Tahap I syarat salur Tahap II
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan Pendidikan TA. 2023 Tahap I syarat salur Tahap II
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan Pendidikan TA. 2023 Tahap I syarat salur Tahap II
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan Pendidikan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahap I syarat salur Tahap II TA. 2023
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan Pendidikan pada Dinas Pariwisata Tahap I syarat salur Tahap II TA. 2023
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan P2KB Tahap I syarat salur Tahap II TA. 2023
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan Kesehatan pada DPKP Tahap I syarat salur Tahap II TA. 2023
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan Kesehatan pada RTP dan TU Pimpinan Setda Kabupaten Lumajang Tahap I syarat salur Tahap II TA. 2023
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan Kesehatan TA. 2023 Tahap I syarat salur Tahap II
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan Kesehatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahap I syarat salur Tahap II TA. 2023
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan Kesehatan TA. 2023 Tahap I syarat salur Tahap II
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Bidang Pekerjaan Umum Tahap I syarat salur Tahap II TA. 2023
		LHR atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata Sub bidang Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas Tahap I TA. 2023
		LHR atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum Sub bidang Air Minum Tahap I TA. 2023
		LHR atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) kegiatan DAK Fisik Penugasan



No	Jenis Pengawasan	Obyek Pemeriksaan
		Bidang Sanitasi Sub bidang Sanitasi Tahap I TA. 2023
		LHR atas Analisis Standar Biaya (ASB), Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Lumajang Tahun 2024
4.	Monitoring	Monitoring Inflasi Kabupaten Lumajang (Laporan harian pada https://bitly/waspengendalianinflasi)
		LHM atas Penanganan Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2023 di Wilayah Kabupaten Lumajang
5.	Evaluasi	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada DPMPSTP Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BKD Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada DISKOMINFO Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BAPPEDA Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada DPKP Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023



No	Jenis Pengawasan	Obyek Pemeriksaan
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada DPMD Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPKD Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BAKESBANGPOL Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Sosial P3A Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada DIARPUS Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada DPUTR Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023



No	Jenis Pengawasan	Obyek Pemeriksaan
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada SATPOL PP Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dispora Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023



Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat dituangkan dalam LHP, dan akan diserahkan kepada obyek pemeriksaan untuk dapat ditindaklanjuti. Tujuan akhirnya adalah meminimalisir, resiko penghambat pencapaian tujuan dan sasaran secara memadai. Selama ini obyek pemeriksaan kurang tanggap Laporah Hasil Pemeriksaan sehingga Inspektorat Daerah perlu:

- 1) Meningkatkan intensitas penagihan tindak lanjut kepada objek untuk meningkatkan efektivitas hasil pengawasan dan memberikan pemahaman bahwa tindaklanjut pada dasarnya adalah untuk kepentingan obrik itu sendiri;
- 2) *Updating* sistem informasi yang memuat hasil pemeriksaan dan tindak lanjut obrik;
- 3) Melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum (APH) atas temuan keuangan yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan;
- 4) Melakukan percepatan pencapaian tindak lanjut untuk temuan yang bersifat administratif.

b. Inspektorat Daerah Service Center (ISC)

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selain menjadi pengawas internal pemerintahan juga wajib memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atas pengaduan, pemberian informasi serta konsultasi dan pendampingan kepada ASN atau perangkat daerah yang masuk melalui pelayanan *Inspektorat Services Center (ISC)*. Berikut capaian layanan ISC yang telah dilakukan oleh APIP sesuai standar .

Tabel 13. Perbandingan Layanan ISC Tahun 2022 dan Triwulan III Tahun 2023

No	Jenis layanan	Tahun 2022		Triwulan II Tahun 2023		Triwulan III Tahun 2023	
		Masuk	Selesai	Masuk	Selesai	Masuk	Selesai
1	Pengaduan	13	11	3	2	17	14
2	Konsultasi dan Pendampingan	25	25	27	27	5	5

Sumber : Data Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan 2023

Hasil dari layanan konsultasi dan pendampingan umumnya dituangkan dalam bentuk laporan, namun pada beberapa kasus hanya berupa komunikasi lesan yang tidak sampai berwujud laporan, dikarenakan proses konsultasi singkat yang sudah dianggap cukup. Di



sisi lain, APIP juga wajib menangani kasus yang dilaporkan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14. Penanganan Kasus Triwulan III Tahun 2023 dan Periode Sebelumnya

No	Uraian	Tahun 2022		Triwulan II Tahun 2023		Triwulan III Tahun 2023	
		Masuk	Selesai	Masuk	Selesai	Masuk	Selesai
1	Ijin Perceraian	16	16	2	2	5	5
2	TP/TGR	3	3	1	0	2	2
3	Pelanggaran Disiplin	16	16	4	1	2	1
4	Investigatif	5	5	8	4	1	0
5	Dumas	3	3	3	2	17	14
Jumlah		43	43	19	8	27	22

Sumber : Data Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan Triwulan III 2023

Penanganan kasus menunjang ketercapaian indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Penanganan kasus masuk dalam Program Penyelenggaraan Pengawasan, satu dari tiga program yang dilaksanakan Inpektorat daerah di tahun 2023. Dengan memperhatikan jumlah kasus yang masuk sebanyak 27 dan telah diselesaikan 22, maka capaian penyelesaian kasus pada triwulan III mencapai 81,48 %. Capaian ini tidak berarti menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Daerah kabupaten Lumajang dalam penanganan kasus rendah. Hal ini disebabkan karena dalam penanganannya, terdapat beberapa kasus yang memerlukan waktu lebih dari triwulan, bahkan sampai satu tahun lebih, mengingat sulitnya tingkat pengungkapan data dan fakta.

Banyaknya Kasus yang ditangani oleh Inpektorat daerah Kabupaten Lumajang tidak diimbangi oleh jumlah SDM yang memadai, sehingga pekerjaan berlebih (*Overload*) menjadi salah satu faktor yang menghambat pencapain target kinerja pengawasan.

c. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Zona Integritas

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) juga menjadi fokus perhatian dengan menjadi salah satu indikator kegiatan yaitu jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi PMPRB. Pelaksanaan evaluasi PMPRB menggunakan kertas kerja evaluasi yang

telah ditetapkan sebelumnya dan diterapkan kepada seluruh perangkat daerah. Nilai PMPRB unit (Perangkat Daerah) ikut menyumbang nilai PMPRB tingkat Kabupaten.

Beberapa langkah telah dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai salah satu anggota tim PMPRB Kabupaten dengan inovasi Peer Reviu PMPRB antar OPD sehingga terjadi saling membutuhkan dan menyediakan kelengkapan PMPRB antar OPD. Penyusunan Road Map PMPRB tahun 2020-2025 harus segera dilaksanakan disamping juga menyusun pedoman/SOP masing-masing unsur dalam PMPRB. Tim PMPRB Kabupaten harus pro aktif dalam menggerakkan perangkat daerah untuk segera melakukan percepatan pemenuhan unsur PMPRB disamping memperbaiki sistem di tingkat Kabupaten.. Upaya yang telah dilakukan antara lain :

- 1) Sosialisasi pembangunan zona integritas kepada seluruh perangkat daerah dan unit kerja
- 2) Penunjukan perangkat daerah dan unit kerja yang diusulkan untuk pembangunan zona integritas melalui Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/241/427.12/2021 tentang Perangkat Daerah yang Diusulkan Sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- 3) Asistensi, pendampingan dan verifikasi kepada perangkat daerah dan unit kerja dalam pembangunan zona integritas
- 4) Koordinasi dengan Kemen PAN-RB dalam hal penilaian dan evaluasi pembangunan zona integritas di Kabupaten Lumajang.

Pada Triwulan III tahun 2023, Inpektorat daerah masih menunggu penyelesaian konsep baru Reformasi Birokrasi, yaitu reformasi Birokrasi Tematik. Perbedaan utama Reformasi Birokrasi versi lama dengan Reformasi Birokrasi tematik adalah, Reformasi Birokrasi lama berkonsep pada pemenuhan daya dukung saja dan hasil survei menunjukkan bahwa konsep ini belum menyentuh akar persoalan masyarakat. Sedangkan Reformasi Birokrasi Tematik harus mampu menyelesaikan persoalan di sekelilingnya. Konsep baru Reformasi Birokrasi Tematik berfokus pada 4 (empat) tema yaitu Penghentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Layanan Pemerintah, serta Mendukung Program Presiden. (Sumber: <http://sipp.menpan.go.id> tahun 2023).

d. Pelaksanaan Saber Pungli, *Whistle Blower System* (WBS) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Saber Pungli adalah kegiatan pengawasan Inspektorat daerah berkolaborasi dengan APH seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 telah dilakukan Operasi Tangkap tangan (OTT), dimana proses pemeriksaan terhadap kasus tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

Pelaksanaan *Whistle Blower System* (WBS) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) selain didukung dengan adanya Peraturan Bupati Lumajang terkait pelaksanaan WBS juga didukung dengan pengembangan website Inspektorat daerah Kabupaten Lumajang dengan alamat www.inspektorat.lumajangkab.go.id. Pengembangan ini berupa *interface website* yang mempermudah masyarakat untuk melaporkan adanya penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Semua laporan yang masuk melalui website maupun secara langsung akan ditindaklanjuti oleh APIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka menjalankan fungsi *third line*, Inspektorat daerah Kabupaten Lumajang melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk pelaporan gratifikasi, dimana Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi di Tingkat Kabupaten berupaya mempermudah akses Penyelenggara Negara dalam melaporkan gratifikasi. Langkah-langkah yang telah ditempuh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam mensosialisasikan pelaporan gratifikasi dilakukan berbasis website yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Selain itu Inspektorat daerah juga melakukan publikasi melalui pendistribusian X – Banner kepada setiap Perangkat Daerah, Hal ini ditujukan agar setiap pengguna layanan pada masing masing Perangkat Daerah memiliki kesempatan yang sama untuk melaporkan indikasi gratifikasi. Langkah lain yang dilakukan Inspektorat Daerah dalam mensosialisasikan pelaporan gratifikasi adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi secara tatap muka.

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) melaporkan hasil gratifikasi kepada Bupati setiap tahunnya. Pada Triwulan III terdapat 1 (satu) Laporan

gratifikasi kepada UPG Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Saat ini pelaporan gratifikasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor 1092/GTF-02/13/10/2023 tanggal 2 Oktober 2023 Tentang Penetapan Status kepemilikan Gratifikasi Atas Nama Arista Fiorentin, dimana uang gratifikasi telah disetorkan kepada kas Negara.

5. Permasalahan dan Inovasi Inpektorat Daerah Kabupaten Lumajang pada Triwulan III Tahun 2023

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang menganalisa beberapa permasalahan yang kemudian memunculkan inovasi yang telah dilakukan. Adapun permasalahan yang ada diantaranya adalah:

- a. APIP belum tergabung dalam sebuah asosiasi yang dapat berfungsi sebagai wadah koordinasi pengawasan di lumajang, baik di sekolah, rumah sakit ataupun perusahaan daerah;
- b. APIP Perlu mengembangkan *remote internal control* yang mendukung *remote internal audit*;
- c. APIP perlu membangun/kloning sistem RB dan ZI sehingga dapat melakukan pembangunan RB dan ZI sepanjang tahun dengan *history* yang jelas;
- d. APIP belum dapat memenuhi layanan konsultasi *real time online* pada saat dibutuhkan;

Untuk itu Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang berinovasi dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Proses pembangunan ASPILU (Asosiasi Pengawas Lumajang) sebagai wadah koordinasi pengawas internal di Lumajang (Pengawas Sekolah, SPI Rumah Sakit, SPI BUMD, Camat selaku pengawas Desa dan pengawas lainnya);
- b. Dalam Proses Penyusunan kebijakan *Remote Internal Control* dalam SPIP dan *Remote Internal Audit*;
- c. Proses Pembangunan sistem MCP untuk Desa;
- d. Proses Pembangunan Sistem Informasi RB dan ZI internal Lumajang;
- e. Proses Penyusunan kebijakan Layanan Konsultasi *Real time online*;
- f. Telah dibangun Ruang Sidang Terintegrasi



B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan salah satu modal input bagi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama Bupati. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Inspektur Daerah dengan Bupati Lumajang. Berikut adalah anggaran yang merupakan tanggung jawab Inspektorat Daerah untuk dikelola secara transparan, efektif dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Tabel 15. Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
A. Program/Kegiatan Teknis			Jumlah (RP)	%
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	331.770.000	287.106.500	86,54
1.a	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	229.101.000	202.319.500	91,69
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	70.791.000	66.582.000	94,05
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	59.841.000	43.387.000	72,50
	Reviu Laporan Kinerja	14.994.000	14.984.000	99,93
	Reviu Laporan Keuangan	24.969.000	24.812.000	99,37
	Pengawasan Desa	19.500.000	19.500.000	100
	Kerjasama Pengawasan Internal	25.047.000	19.178.500	76,57
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	13.987.000	13.876.000	99,41
1.b	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	102.669.000	84.787.000	90,01
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12.690.000	12.675.000	99,88
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	89.979.000	72.112.000	80,14
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	287.301.000	171.235.500	59,60



2.a	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	59.272.000	12.848.000	15,55
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	41.304.000	12.848.000,	31,11
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	17.968.000	0	0
2.b	Pendampingan dan Asistensi	228.029.000	158.387.500	76,17
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	5.860.000	4.380.000	74,74
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31.839.000	23.040.000	72,36
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	170.396.000	112.742.500	66,16
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	19.934.000	18.225.000	91,43
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	5.416.402.705	3.907.692.537	72,66
3.a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.958.000	5.962.000	27,15
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.999.000	5.962.000	99,38
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.999.000	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.980.000	0	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.980.000	0	0
3.b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.261.452.470	3.302.102.289	50,43
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.212.594.470	3.269.053.289	77,60
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.260.000	30.195.000	75
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.866.000	2.854.000	99,58
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	2.866.000	0	0
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.866.000	0	0



3.c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	225.990.000	0	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	225.990.000	0	0
3.d	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.951.037	231.052.212	91,64
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.985.676	4.928.450	98,85
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.010.019	82.009.315	98,79
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.980.342	10.975.100	99,95
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.975.000	133.139.347	68,99
3.e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.032.263	10.190.000	26,79
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.032.263	10.190.000	26,79
3.f	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.004.330	227.872.105,00	55,45
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	265.000	29,44
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.232.330	98.139.684	62,02
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.872.000	129.467.421	74,89
3.g	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.014.605	140.703.931	47,78
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.360.605	106.715.931	70,50
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.660.000	33.988.000	72,84
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.994.000	0	0
JUMLAH		6.035.473.705	4.376.224.537	72,51

Sumber : Inspektorat Daerah (Data Diolah Tahun 2023)



Pagu anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 6.035.473.705. Berdasarkan tabel 15 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi pada Triwulan III mencapai Rp. 4.376.224.537 atau mencapai 72,51 %. Beberapa kegiatan dan sub-kegiatan capaiannya bernilai nol dikarenakan memang tidak ditargetkan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2023.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

Tabel 16. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Triwulan III Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	10
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan Meningkatnya efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Minimal 3,5.	-	73,47%	98	1,384,992,509	1,351,922,332	98	N/A

Sumber : Data diolah Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023

Capaian anggaran Inspektorat Daerah pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp. 1.351.922.332 dari alokasi yang dianggarkan sebesar 1,384,992,509, atau mencapai 98%. Perlu kami sampaikan bahwa telah mengalami perubahan dari Rp. 1.729.744.601 (berdasarkan dokumen *action Plan* Inspektorat daerah tahun 2023), sedangkan target anggaran yang tertera pada tabel 16 di atas didasarkan pada Perubahan APBD pada Bulan September tahun 2023.



Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Pada Triwulan III diukur dari Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang dengan Bupati Lumajang dengan Indikator Kinerja yang berbunyi "Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Minimal 3,5." Indikator Kinerja ini lebih menggambarkan sebuah potret penerapan Sistem Pengendalian Intern yang capaiannya bersifat fluktuatif. Merunut pada dokumen *Action Plan* Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023, Pada Triwulan III Target kinerja tidak ditetapkan, karena pengukuran terhadap indikator kinerja dilakukan setiap akhir semester, atau pada akhir periode triwulan genap. Namun demikian, untuk mengukur dan memantau kinerja inpektorat pada triwulan III, dilakukan perbandingan dengan target capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 75%, maka capaian kinerjanya mencapai 98%. Capaian ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja. Laporan kinerja dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pengawasan pemerintahan pada Triwulan III Tahun 2023.

Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Inspektorat Daerah sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya selaku penyelenggara pengawasan Internal dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lumajang dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja.

Walaupun capain kinerja Inspektorat Daerah sudah masuk kategori sangat baik namun masih terdapat permasalahan dan hambatan sehingga perlu direncanakan pengambilan langkah strategis dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah.

Tabel 17. Hambatan/Tantangan dan Langkah Strategis Triwulan III Tahun 2023

No.	Hambatan / Tantangan	Rencana Langkah Strategis
1.	Kuantitas SDM secara umum masih sangat terbatas	<ul style="list-style-type: none">• Mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan diklat-diklat, bimtek, pembinaan, sosialisasi baik formal maupun non formal.• Mengajukan penambahan personil kepada BKD• Melakukan pemeriksaan dengan teknik sampling dengan <i>risk based audit</i>;• Penyelesaian tugas berdasarkan skala prioritas.



No.	Hambatan / Tantangan	Rencana Langkah Strategis
2	Sarana dan prasarana pendukung pengawasan yang perlu ditingkatkan	Pemenuhan secara bertahap dengan memasukkan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan pada RKBMD dan RKA, terutama untuk inovasi <i>remote internal control</i> yang mendukung <i>remote internal audit</i>
3	Adanya temuan pemeriksaan yang berulang dan sulit ditindaklanjuti	Melakukan percepatan tindaklanjut dengan mengundang perangkat daerah secara intensif.
4	Sistem dan Prosedur Pengawasan cukup memadai namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem informasi pengawasan	Pengembangan sistem, prosedur, kebijakan serta teknis penyelenggaraan pengawasan dan dikembangkan secara bertahap sesuai ketentuan dan akan ditingkatkan melalui sistem informasi pengawasan terintegrasi.
5	Kualitas implementasi SPIP perangkat daerah Kurang memadai	Pendampingan dan evaluasi SPIP melalui model evaluasi terbaru dari BPKP kepada seluruh OPD, dan didukung dengan peraturan yang terintegrasi dengan Nilai Indeks Pengawasan
6	upaya pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi di tingkat perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten Kurang memadai.	Asistensi dan verifikasi upaya pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi kepada perangkat daerah melalui kolaborasi dengan Tim Reformasi Birokrasi tingkat Kabupaten.
7	Semakin banyaknya kebutuhan pelayanan pengaduan dan konsultasi.	Membangun layanan konsultasi <i>real time online</i> untuk meningkatkan Ketepatan waktu dan kualitas pelayanan publik.
8	Instrumen pencegahan korupsi di tingkat desa belum terbangun secara terintegrasi	Membangun sistem MCP untuk tingkat desa dengan mengadopsi MCP tingkat kabupaten oleh KPK RI

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam laporan kinerja ini, saran dan kritik yang membangun akan dijadikan pertimbangan dalam menyusun laporan kinerja selanjutnya sehingga mampu memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.



LAMPIRAN



Lampiran 1. Matrik Perubahan Renstra Tahun 2018-2023

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Dikindak Lanjuti	%	62%	62%	N/A	63%	N/A	65%	265,995,000	70,0%	341,459,000	75%	785,000,000	75%	1,392,454,000	Inspektorat Daerah
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan umum (general) yang diterbitkan	Laporan	275	275	N/A	115	N/A	147	162,535,000	140	240,376,000	147	505,000,000	434	907,911,000	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Laporan	93	93	N/A	63	N/A	70	36,337,000	70	43,932,000	64	125,000,000	204	205,269,000	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Laporan	14	14	N/A	10	N/A	13	21,776,000	18	71,208,000	18	100,000,000	49	192,984,000	
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Laporan	2	2	N/A	2	N/A	2	7,200,000	2	16,554,000	2	50,000,000	6	73,754,000	
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	Laporan	1	1	N/A	1	N/A	1	10,800,000	1	30,015,000	1	50,000,000	3	90,815,000	
Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	Laporan	158	158	N/A	10	N/A	32	52,560,000	20	36,065,000	30	100,000,000	82	188,625,000	
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Kesepakatan	5	5	N/A	27	N/A	27	33,862,000	27	30,230,000	30	50,000,000	84	114,092,000	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen	2	2	N/A	2	N/A	2	-	2	12,372,000	2	30,000,000	6	42,372,000	



Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (specific) yang diterbitkan	Laporan	24	24	N/A	29	N/A	30	103,460,000	35	101,083,000	45	280,000,000	110	484,543,000	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang diangani	Laporan	4	4	N/A	4	N/A	5	1,875,000	5	-	5	30,000,000	15	31,875,000	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	20	20	N/A	25	N/A	25	101,585,000	30	101,083,000	40	250,000,000	95	452,668,000	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti	%	62%	62%	N/A	63%	N/A	65%	159,453,000	70.0%	238,880,000	75%	675,000,000	75%	1,073,333,000	
	Persentase LHP yang sesuai standar	%	85%	85%	N/A	85%	N/A	90%		90%		90%		90%		
	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3	3	N/A	3	N/A	3,25		3,25		3,5		3,5		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan	Laporan	6	6	N/A	6	N/A	10	30,036,000	10	57,052,000	10	300,000,000	30	387,088,000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Rekomendasi	4	4	N/A	5	N/A	10	13,086,000	10	37,627,000	15	150,000,000	35	200,713,000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	Rekomendasi	4	4	N/A	5	N/A	10	16,950,000	10	19,425,000	15	150,000,000	35	186,375,000	
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang diterbitkan	Laporan	132	132	N/A	136	N/A	30	129,417,000	34	181,828,000	34	375,000,000	593	686,245,000	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan	Perangkat daerah	60	60	N/A	61	N/A	72	1,342,000	72	11,277,000	72	25,000,000	216	37,619,000	



Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	pemerintahan daerah															
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Perangkat daerah	52	52	N/A	52	N/A	52	9,150,000	52	31,890,000	52	100,000,000	156	141,040,000	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	6	6	N/A	6	N/A	6	105,845,000	10	118,657,000	10	150,000,000	26	374,502,000	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Perangkat daerah	14	14	N/A	17	N/A	83	13,080,000	56	20,004,000	56	100,000,000	195	133,084,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	%	85%	85%	N/A	83%	N/A	95%	4,612,181,342	95%	4,624,339,660	95%	6,585,100,000	95%	15,821,621,002	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100%	100%	N/A	100%	N/A	100%	5,659,000	100%	5,773,000	100%	32,000,000	100%	43,432,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	3	N/A	3	N/A	3	964,000	2	2,826,000	3	8,000,000	8	11,790,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	3	3	N/A	3	N/A	3	1,670,000	3	-	3	8,000,000	9	9,670,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Laporan	5	5	N/A	5	N/A	5	991,000	5	-	5	8,000,000	15	8,991,000	



Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	dan Ditisar Realisasi Kinerja SKPD															
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	8	N/A	8	N/A	8	2.034,000	8	2.907,000	8	8.000,000	24	12.941,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	83%	83%	N/A	83%	N/A	100%	3.847.285,655	100%	3.939.137,150	100%	4.763.500,000	100%	12.549.922,805	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	35	35	N/A	34	N/A	33	3.837,816,303	33	3.904,301,150	33	4.400,000,000	33	12.142,117,453	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12	N/A	12	N/A	12	6,546,352	12	34,836,000	12	350,000,000	36	391,382,352	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	6	N/A	6	N/A	6	2,072,000	6	-	6	2,500,000	18	4,572,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	N/A	18	N/A	18	851,000	18	-	18	8,000,000	54	8,851,000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	1	N/A	1	N/A	1	-	1	-	1	3,000,000	3	3,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	%	100%	100%	N/A	100%	N/A	100%	13,168,000	100%	-	100%	235,000,000	100%	248,168,000	



Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	28	28	N/A	4	N/A	4	13,168,000	28	-	28	200,000,000	28	213,168,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	N/A	0	N/A	0	-	0	-	40	35,000,000	40	35,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	%	100%	100%	N/A	100%	N/A	100%	298,896,440	100%	284,781,830	100%	368,000,000	100%	951,678,270	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	N/A	1	N/A	1	5,086,400	1	3,106,840	1	5,000,000	1	13,193,240	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	N/A	2	N/A	2	102,509,260	2	85,768,210	2	100,000,000	6	288,277,470	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	N/A	1	N/A	1	10,911,780	1	10,911,780	1	11,000,000	3	32,823,560	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	N/A	1	N/A	2	25,694,000	2	-	2	2,000,000	6	27,694,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	30	N/A	30	N/A	40	154,695,000	40	184,995,000	40	250,000,000	120	589,690,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	%	100%	100%	N/A	100%	N/A	90%	126,341,338	90%	-	90%	600,000,000	90%	726,341,338	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	N/A	2	N/A	6	126,341,338	0	-	4	600,000,000	10	726,341,338	



Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	%	100%	100%	N/A	100%	N/A	100%	212.830,600	100%	210.253,200	100%	235,000,000	100%	658,083,800	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	N/A	12	N/A	12	24,000	12	1,716,000	12	5,000,000	36	6,740,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	N/A	12	N/A	12	58,081,600	12	55,137,600	12	70,000,000	36	183,219,200	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	N/A	12	N/A	12	154,725,000	12	153,399,600	12	160,000,000	36	468,124,600	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	%	90%	90%	N/A	90%	N/A	90%	108,000,309	90%	184,434,480	90%	351,600,000	90%	644,034,789	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	27	27	N/A	27	N/A	27	80,495,309	27	146,859,480	27	301,600,000	27	528,954,789	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	36	36	N/A	36	N/A	36	27,505,000	36	37,575,000	36	50,000,000	36	115,080,000	
Jumlah									5,037,629,342		5,204,678,660		8,045,100,000		18,287,408,002	



Lampiran 2. Matrik Rencana Kerja Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	75%	934,016,000	DAU
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan umum (general) yang diterbitkan	147	655,296,000	
1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	64	164,796,000	
1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	18	210,500,000	
1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	2	50,000,000	
1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	1	50,000,000	
1.5	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	30	100,000,000	
1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	30	50,000,000	
1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	2	30,000,000	
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (spesifik) yang diterbitkan	45	278,720,000	
2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang ditangani	5	28,720,000	



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	40	250,000,000	
B	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti 2. Persentase LHP yang sesuai standar 3. Nilai Kapabilitas APIP	1. 75% 2. 90% 3. 3,5	698,472,200	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan	10	295,000,000	
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	15	150,000,000	
1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	15	145,000,000	
2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang diterbitkan	34	403,472,200	
2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	72	25,000,000	
2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	49	100,000,000	



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10	178,472,200	
2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	56	100,000,000	
C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	95%	6,566,594,600	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	34,000,000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	8,000,000	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	3	8,000,000	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	8,000,000	
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8	10,000,000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4,458,500,000	



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34	4,400,000,000	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	12	50,000,000	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	6	2,500,000	
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	18	3,000,000	
2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1	3,000,000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100%	226,000,000	
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	28	200,000,000	
3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	41	26,000,000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	372,635,000	



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	10,000,000	
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2	100,000,000	
4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1	11,000,000	
4.4	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2	2,000,000	
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40	249,635,000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	90%	555,200,000	
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4	555,200,000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	438,699,600	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	5,000,000	
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	280,300,000	



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	153,399,600	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	90%	481,560,000	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	27	301,600,000	
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	36	50,000,000	
7.3	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1	129,960,000	